

Prioritisasi Permasalahan Sosial Ekonomi Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)

Tommi Andria Wahyudi¹ dan Didik Ardianto²

Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

tommi_taw@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh Kecamatan Dendang pada Kabupaten Belitung Timur. Identifikasi dan pemetaan permasalahan dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu aspek administrasi kependudukan, aspek sumberdaya manusia, aspek sosial dan aspek ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial ekonomi dengan pendekatan kualitatif dan Analisis Hierarki Proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan ada 10 prioritas masalah pada Kecamatan Dendang yaitu Kesejahteraan penduduk sektor perkebunan rendah, Pendidikan usia produktif rendah, Tingkat pendidikan penduduk rendah, Keluarga belum memiliki kartu keluarga, Tingginya Pernikahan Anak, Penduduk belum memiliki akta kelahiran, Rendahnya status kesehatan balita, Tingginya kasus diare, Lansia tidak produktif, dan Penduduk disabilitas. Penelitian ini diakhiri dengan memetakan perangkat daerah yang akan merencanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu dengan mensinergikan dan mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan.

Kata Kunci : Permasalahan Kecamatan; Analysis Hierarchy Process; Belitung Timur

1. PENDAHULUAN

Kecamatan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah dari Kabupaten atau Kota. Kecamatan merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat yang merupakan kepala kecamatan melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan kepadanya dan juga bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan umum. Karenanya kecamatan menempati posisi penting dalam pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan sinergitas yang terjalin baik antar pelaku pembangunan. Camat sebagai salah satu pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dituntut untuk mensinergikan baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Pelaksanaan sinergitas pelaksanaan pembangunan akan efektif dilakukan jika berdasarkan pada pengetahuan yang sama terhadap persoalan yang sedang dan akan dihadapi.

Upaya untuk menentukan pemahaman yang sama terhadap persoalan pembangunan penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat memperkirakan dan merencanakan seberapa besar sumberdaya yang akan digunakan untuk melakukan intervensi baik berupa program atau kegiatan. Kecamatan Dendang yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah administratif yang berada dalam Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Memiliki Luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Belitung Timur (lihat tabel 1).

Tabel 1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah / Total	
1	Manggar	9	229	20.166	19.187	39.353	171,85
2	Gantung	7	546.3	14.678	13.673	28.351	51,90
3	Dendang	4	243.3	5.494	5.080	10.574	43,46
4	Kelapa Kampit	6	498.5	9.715	9.256	18.971	38,06
5	Damar	5	236.9	6.644	6.397	13.041	55,05
6	Simpang Renggiang	4	390.7	3.843	3.603	7.446	19,06
7	Simpang Pesak	4	362.2	4.355	4.087	8.442	23,31
Jumlah		39	2506.9	64,895	61,283	126.178	50,33

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2020 (diolah)

Pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama ini belum dilakukan sepenuhnya berbasis data yang akurat. Hal ini menandakan bahwa belum ada arahan yang jelas terkait dengan lokus intervensi pembangunan di Kecamatan khususnya di Kecamatan Dendang. Sebab lainnya adalah belum adanya pemetaan permasalahan sehingga menyebabkan lambat dan tidak terarahnya intervensi program dan kegiatan Kecamatan di Belitung Timur. Upaya sinergitas dalam intervensi program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Dendang akan efektif dilakukan jika diperkuat dengan identifikasi persoalan dan arahan penanganannya. Karenanya penelitian ini disusun untuk membantu dalam upaya dimaksud.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan melakukan survey atau meminta pendapat ahli pengampu urusan perencanaan pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan terhadap permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Dendang yang menjadi prioritas harus diselesaikan dengan cara memberikan bobot. Hasil pemetaan dilakukan pemilihan prioritas dengan menggunakan metode prioritisasi menggunakan *software Analytic Hierarchi Process*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2018 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

2.2 Prioritas

Kusrini (2007) menjelaskan Langkah langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun daftar skala prioritas adalah:

- studi kelayakan, pada langkah ini, sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian prosedur, pengumpulan data, identifikasi masalah, identifikasi kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah;
- perancangan, pada tahapan ini diformulasikan model yang akan digunakan dan kriteria-kriteria yang ditentukan, kemudian dicari alternatif model yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya memprediksi keluaran yang mungkin dan menentukan variabel-variabel model;

- c) pemilihan, menentukan berbagai alternatif model berserta variabel-variabelnya serta pemilihan modelnya, termasuk solusi dari model tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas, yakni dengan mengganti beberapa variabel yang tidak relevan; dan
- d) Membuat daftar skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terkait dengan perbaikan infrastruktur maupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.3 Kecamatan

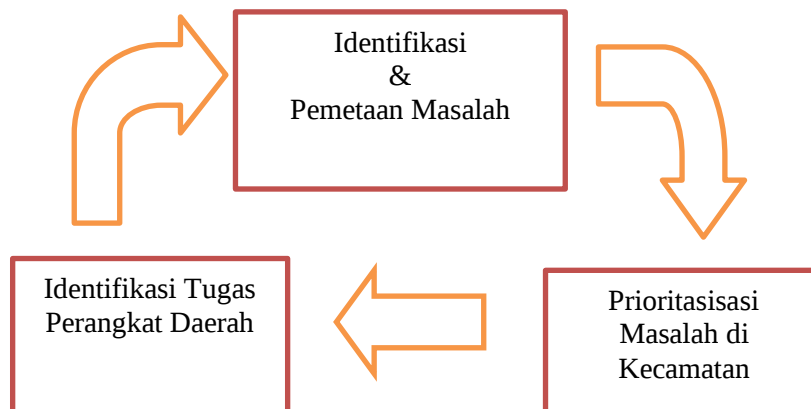
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Camat dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya bertugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: (1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; (2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; (3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan (4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: (1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; (2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan (3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: (1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: (1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; (2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan (3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: (1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; (2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan (3) pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: (1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; (2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; (3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan (3) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan (4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Konsep Penelitian

Kerangka kajian yang digunakan dalam analisis permasalahan pembangunan di Kecamatan Dendang ini adalah dimulai dengan melakukan identifikasi dan pemetaan data yang dikumpulkan dari berbagai aspek. Berikutnya adalah melakukan prioritisasi masalah untuk kemudian disinergiskan dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah. Proses prioritisasi masalah dilakukan dengan menentukan masalah

berdasarkan pada pendapat dari pejabat eselon 3 yang membidangi perencanaan daerah. Pada proses ini digunakan alat analisis *Multi Criterion Decision Making* atau *Analytic Hierarchi Process*.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur karena peneliti ingin mengetahui permasalahan utama yang ada pada Kecamatan Dendang. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta pengamatan lingkungan dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur dan literatur lain seperti Undang-undang dan Peraturan Menteri, serta hasil penelitian terkait dengan kondisi sosial ekonomi.

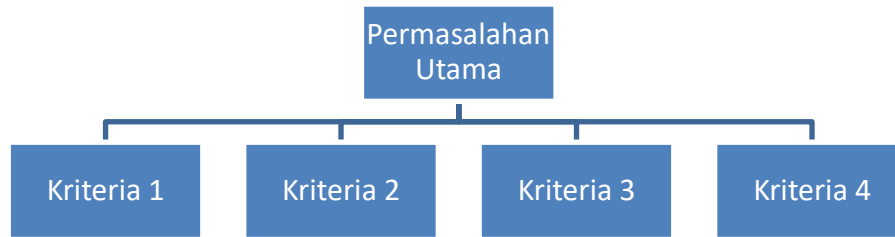
Hasil pemetaan permasalahan tersebut berikutnya dilakukan pemilihan prioritas dengan meminta pendapat ahli. Ahli yang dimaksud adalah pejabat eselon 3 yang mengampu urusan perencanaan dan kepala seksi pembangunan pada Kecamatan Dendang. Tahapan yang dilakukan adalah meminta pendapat ahli terhadap 10 permasalahan tersebut mana yang menjadi prioritas harus diselesaikan dengan cara memberikan bobot. Bobot yang lebih besar antar kesepuluh permasalahan tersebut diurut berdasarkan bobotnya. Data dalam penelitian ini menggunakan satu alat analisis. Metode yang digunakan dalam menentukan prioritas permasalahan yang dihadapi ditingkat kecamatan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan permasalahan yang akan diprioritaskan. AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan dan bisa juga menjadi alat analisis yang digunakan untuk menentukan prioritas (Saaty, 2008). Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hirarki dalam hal ini adalah suatu representasi permasalahan yang kompleks dalam suatu susunan multilevel yang terdiri dari komponen tujuan, faktor, kriteria dan sub kriteria (Saaty, 2008).

AHP dapat digunakan sebagai metode penentuan prioritas masalah disbanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan berikut (Bernasconi, 2010):

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
2. Melakukan perhitungan pada tingkat validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah penelitian dan menentukan prioritas sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Struktur hierarki tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Hierarki

3. Mendefinisikan perbandingan ber-pasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya ditentukan dengan Persamaan (1). $n \times [(n-1)/2]$ (1)

Jumlah penilaian perbandingan dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan sesuai dengan Persamaan (1). Pengumpulan data penilaian perbandingan bisa diperoleh menggunakan kuesioner atau melakukan penilaian perbandingan individu dengan pertimbangan yang sudah ditentukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Situasi Pembangunan Sosial Ekonomi di Kecamatan Dendang

Analisis situasi Sosial Ekonomi Pembangunan di Kecamatan Dendang dalam penelitian ini ini dibatasi dan digambarkan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek sosial yang terdiri dari kependudukan dan administrasi kependudukan, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan. Sementara aspek ekonomi dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan mayoritas penduduk dan penduduk miskin dan rentan yang bekerja di sektor perkebunan.

4.1.1 Aspek Sosial

4.1.1.1 Kependudukan

Salah satu upaya untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di kecamatan Dendang adalah dengan melihat beberapa situasi kependudukan dan administrasi kependudukan di Kecamatan. Beberapa data kependudukan dan administrasi yang digunakan untuk dalam analisis ini adalah jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

Tabel. 2.

Jumlah Penduduk dan Keluarga dengan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kecamatan Dendang Tahun 2020

Desa	Jumlah Penduduk	Penduduk Belum memiliki Akta Kelahiran	Persentase	Jumlah Keluarga	Penduduk Belum memiliki Kartu Keluarga	Persentase
Dendang	2.004	297	14,82	652	86	13,19
Balok	2.174	102	4,69	719	100	13,91
Jangkang	3.267	381	11,66	1.096	104	9,49
Nyuruk	3.129	523	16,71	1.065	22	2,07
Total	10.574	1.303	12,32	3.532	312	8,83

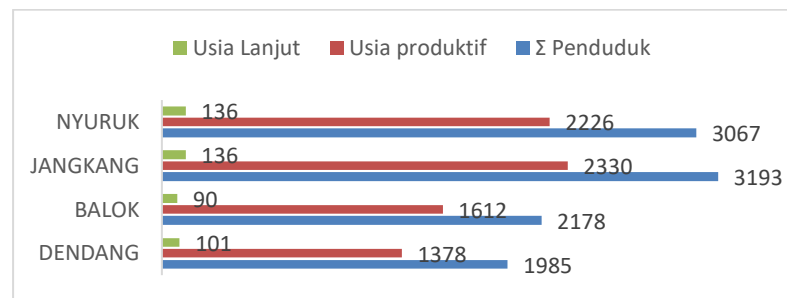
Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Semester II Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan sebaran penduduk di Kecamatan Dendang diketahui masih terdapat 12,32% penduduk yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran dan sebanyak 8,83% keluarga belum memiliki Kartu Keluarga. Hal ini menandakan bahwa cakupan layanan administrasi kependudukan masih harus ditingkatkan lagi.

4.1.1.2 Sumber Daya Manusia

Indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam melihat situasi pembangunan di Kecamatan Dendang adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan atau berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dari penduduk usia produktif salah satunya yang berada di Kecamatan Dendang.

Grafik 1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif
Di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur

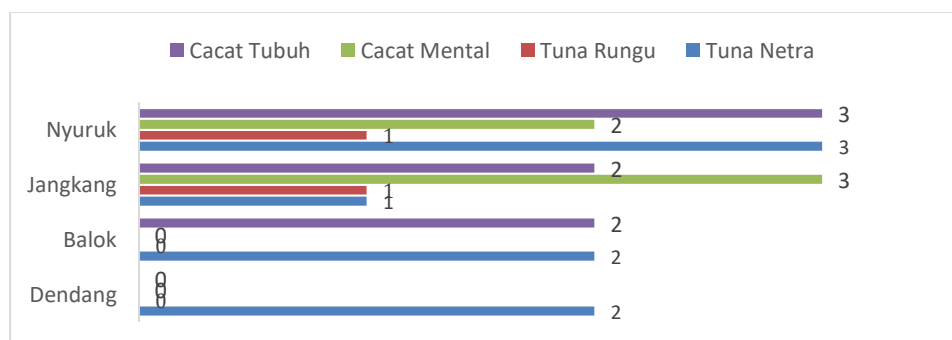


Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

Grafik 1 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk Lanjut usia (Lansia) di Kecamatan Dendang juga dapat dijadikan basis data dalam menilai situasi sumber daya manusia. Penduduk Lansia merupakan objek dan sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek karena Lansia merupakan salah satu warga negara yang berhak atas pembangunan, dengan kata lain pembangunan di daerah khususnya kecamatan harus ramah Lansia. Sementara sebagai subjek karena Lansia yang masih produktif dapat menjadi agen dalam mensukseskan pembangunan di daerah khususnya di kecamatan.

Kecamatan Dendang memiliki 463 jiwa Lansia yang harus diperhatikan dan dipenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara. Sebanyak 448 diantaranya merupakan lansia miskin dan rentan. Sementara dari 448 Lansia tersebut sebanyak 228 orang Lansia masih produktif, sisanya 220 tidak produktif lagi. Selain Lansia, penduduk dengan disabilitas juga harus diurus dalam wilayah Kecamatan Dendang. Jumlah penduduk disabilitas ini masih relatif sedikit, namun membutuhkan sumber daya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan yang tidak sedikit.

Grafik. 2.
Jumlah Penduduk dengan Disabilitas
di Kecamatan Dendang Tahun 2018

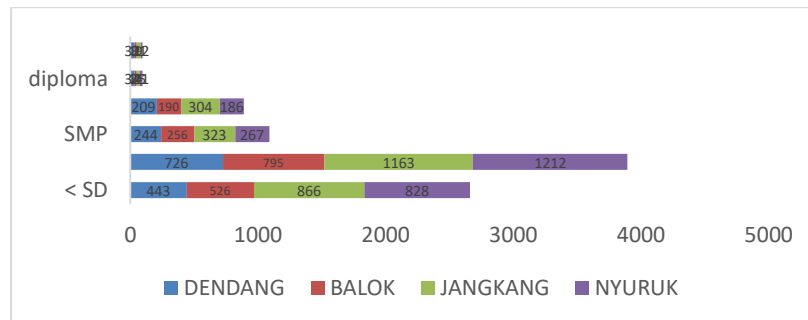


Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

4.1.1.3 Tingkat Pendidikan

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi rendahnya rata-rata lama sekolah yang sampai dengan Tahun 2018 masih diangka 8,14. Kecamatan Dendang memiliki permasalahan yang sama. Rendahnya rata-rata lama sekolah di wilayah ini, dikarenakan penduduk berusia di atas 15 tahun banyak yang putus sekolah sehingga hanya menamatkan Pendidikan jenjang sekolah dasar (3.848 orang) dan sedikit yang hanya menamatkan jenjang SMP (1.135 orang), bahkan masih banyak yang tidak tamat jenjang sekolah dasar (2.998 orang).

Grafik 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Dendang

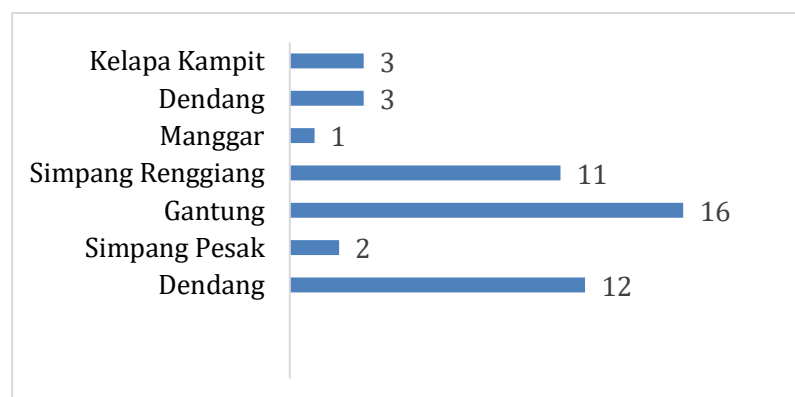


Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

Berdasarkan jenjang pendidikan, penduduk di Kecamatan Dendang yang tidak menamatkan SD sebesar 25,5%, hanya menamatkan SD 37,38%, tamat SMP 10,46%, SMA 8,53% dan kurang dari 1% penduduk dendang yang menamatkan Pendidikan D1/D3 dan $\geq$ S1. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk sangat rendah di Kecamatan Dendang.

Kasus Putus sekolah di Belitung Timur juga disebabkan masih banyaknya pernikahan anak. Kecamatan Dendang pada Tahun 2018 menempati posisi kedua terbanyak kasus pernikahan usia anak.

Grafik 4.
Jumlah Kasus Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Belitung Timur

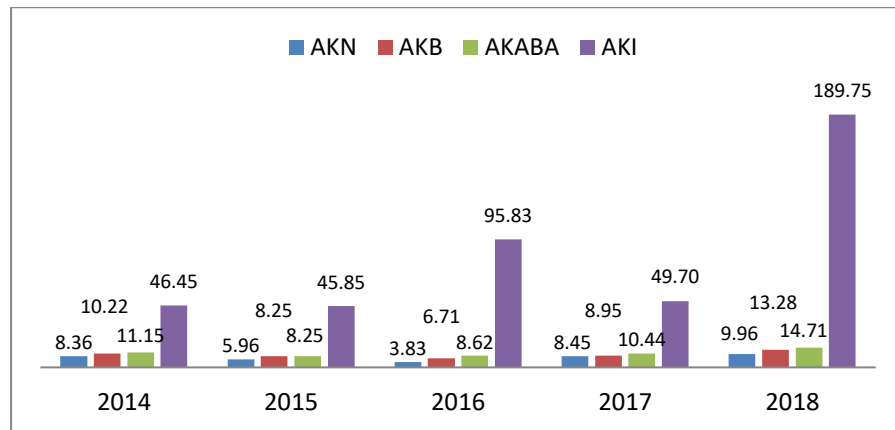


Sumber: Statistik Kesejahteraan Sosial Kabupaten Belitung Timur, BPS 2019 (Diolah)

4.1.1.4 Situasi Kesehatan.

Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi kasus kematian Ibu dan Bayi yang tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 angka kematian Ibu 187,75 sementara kematian bayi sebesar 13,28. Angka ini meningkat cukup tinggi sepanjang 4 tahun terakhir.

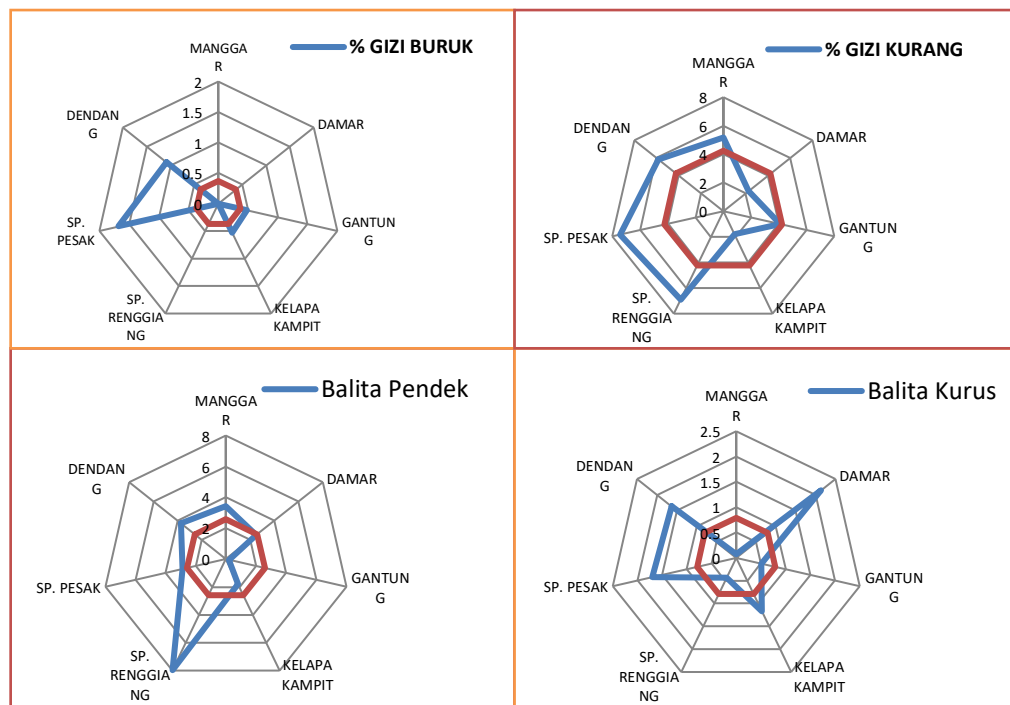
Grafik.5
Indikator Kesehatan Ibu dan Bayi
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2018



Sumber: Profil Kesehatan Belitung Timur, 2019 (Diolah).

Selain kematian bayi, Kabupaten Belitung Timur khususnya Kecamatan Dendang memiliki permasalahan lain terkait dengan bayi atau bayi di bawah lima tahun, yaitu terkait dengan status kesehatannya. Kecamatan Dendang memiliki permasalahan dari keempat status kesehatan balita yaitu balita dengan status gizi buruk, gizi kurang, balita pendek dan kurus.

Grafik.6
Indikator Status Kesehatan Balita
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018



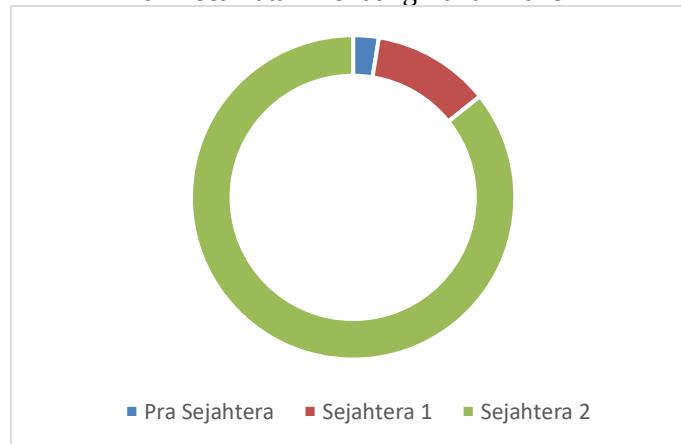
Sumber: Profil Kesehatan Belitung Timur, 2019 (Diolah).

Terkait dengan tingginya kematian bayi di Belitung Timur ada faktor yang harus menjadi perhatian yaitu masih tingginya angka penderita diare sebanyak 126 pada tahun 2018. Tingginya penderita diare merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan di kecamatan Dendang.

4.1.2 Aspek Ekonomi

Aspek terakhir yang menjadi kajian dalam menganalisis permasalahan di Kecamatan Dendang ini adalah aspek ekonomi. Ada beberapa indikator yang dapat dicermati dalam memetakan permasalahan ekonomi yaitu status kesejahteraan yang dilihat dari jenis keluarga, penduduk miskin dan rentan, pekerjaan mayoritas di Kecamatan.

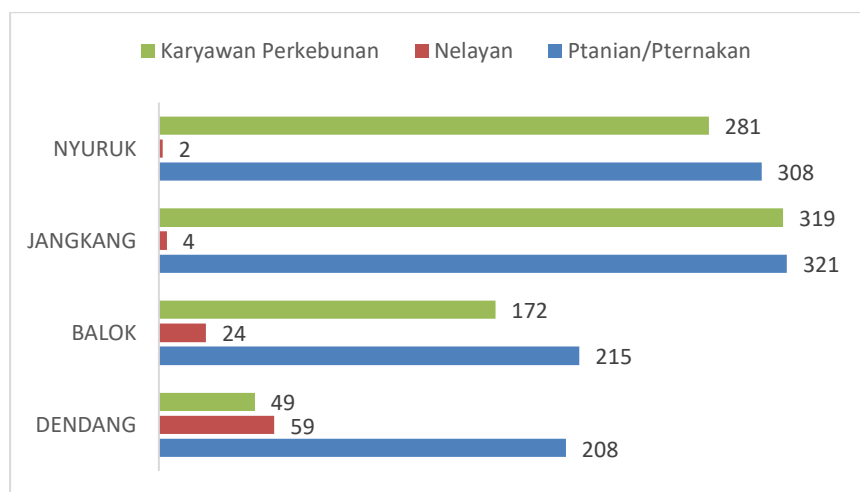
Grafik. 7.
Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan
di Kecamatan Dendang Tahun 2018



Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah)

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa keluarga sejahtera di Kecamatan Dendang sudah semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga semakin baik. Pekerjaan mayoritas penduduk di Kecamatan Dendang adalah sebagai petani dan kedua adalah sebagai karyawan/buruh perkebunan.

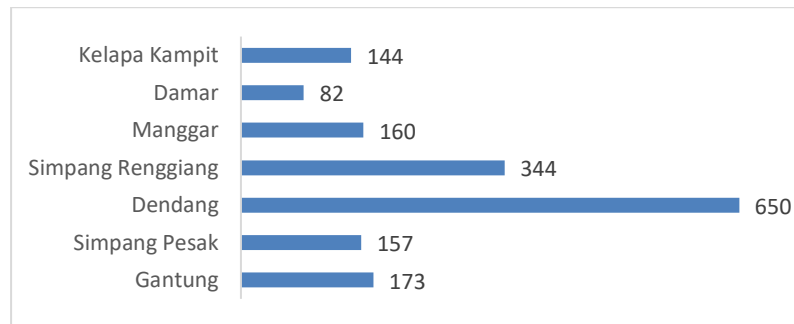
Grafik. 8.
Lapangan Pekerjaan Mayoritas Penduduk
di Kecamatan Dendang Tahun 2018



Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

Penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan sebagai petani sebenarnya adalah penduduk yang bekerja mandiri di sub sektor perkebunan. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan social diketahui bahwa penduduk miskin dan rentan di kecamatan Dendang banyak bekerja di perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Dendang memiliki permasalahan bahwa penduduk yang bekerja di sektor perkebunan memiliki kesejahteraan yang rendah.

Grafik. 9.
Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan yang Bekerja di Perkebunan
di Kecamatan Dendang Tahun 2019



Sumber: Kecamatan Dendang dalam Angka, BPS 2019 (Diolah).

4.2 Prioritisasi Permasalahan

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek sosial dan aspek ekonomi dapat dipetakan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Dendang sebagai berikut:

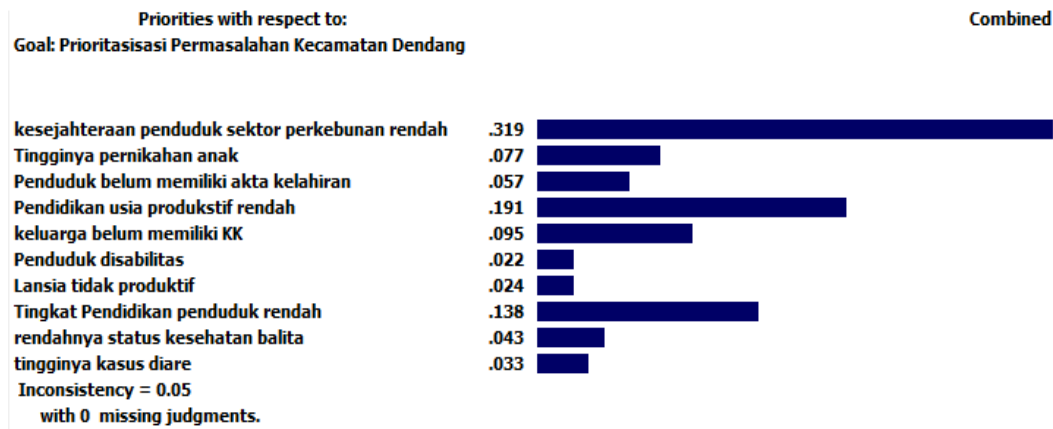
Tabel. 3.
Identifikasi dan Pemetaan Permasalahan di Kecamatan Dendang

No	Aspek	Permasalahan
1.	Sosial	
	Administrasi Kependudukan	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran
		Masih terdapat keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga
	Sumberdaya Manusia	Tingkat Pendidikan Usia Produktif rendah
		Banyak penduduk usia Lanjut yang tidak produktif
		Terdapat penduduk disabilitas
	Pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan penduduk
		Tingginya pernikahan anak
	Kesehatan	Rendahnya status kesehatan Balita
		Tingginya kasus penyakit Diare
2.	Ekonomi	Penduduk yang bekerja di sektor perkebunan memiliki kesejahteraan yang rendah

Hasil pemetaan permasalahan tersebut berikutnya dilakukan pemilihan prioritas dengan meminta pendapat ahli. Ahli yang dimaksud adalah pejabat eselon yang mengampu urusan perencanaan. Metode prioritisasi menggunakan Analytic Hierarchi Process. Tahapan yang dilakukan adalah meminta pendapat ahli terhadap 10 permasalahan tersebut mana yang menjadi prioritas harus diselesaikan dengan cara memberikan bobot. Bobot yang lebih besar antar kesepuluh permasalahan tersebut diurut berdasarkan bobotnya.

Grafik.10.

Prioritisasi Permasalahan di Kecamatan Dendang



Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa prioritas masalah yang harus diselesaikan adalah sebagaimana dalam grafik 10. Pemerintah Kecamatan Dendang harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan mensinergiskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

4.3 Sinergitas Peran Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil prioritisasi permasalahan yang telah dilakukan, berikutnya adalah melakukan sinkronisasi dan sinergi pemecahan masalah berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berikut adalah hasil pemetaan permasalahan yang harus disinergikan perangkat daerah dan Pemerintah Kecamatan Dendang di Belitung Timur.

Tabel. 4.

Sinergitas Pemecahan Masalah Kecamatan Dendang

NO	PERMASALAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Masih terdapat keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Tingkat Pendidikan Usia Produktif rendah	Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM
4	Banyak penduduk usia lanjut yang tidak produktif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Terdapat penduduk disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Rendahnya tingkat pendidikan penduduk	Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM
7	Tingginya pernikahan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PERMASALAHAN	PERANGKAT DAERAH
8	Rendahnya status kesehatan Balita	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Tingginya kasus penyakit Diare	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Penduduk yang bekerja di sektor perkebunan memiliki kesejahteraan yang rendah	Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan didapatkan urutan prioritisasi permasalahan Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, yaitu Kesejahteraan penduduk sektor perkebunan rendah, dengan bobot sebesar 0.319, Pendidikan usia produktif rendah, dengan bobot sebesar 0.191, Tingkat pendidikan penduduk rendah, dengan bobot sebesar 0.138, Keluarga belum memiliki kartu keluarga, dengan bobot sebesar 0.095, Tingginya Pernikahan Anak, dengan bobot sebesar 0.077, Penduduk belum memiliki akta kelahiran, dengan bobot sebesar 0.057, Rendahnya status kesehatan balita, dengan bobot sebesar 0.043, Tingginya kasus diare, dengan bobot sebesar 0.033, Lansia tidak produktif, dengan bobot sebesar 0.024, dan Penduduk disabilitas, dengan bobot sebesar 0.022.

Berdasarkan identifikasi tugas, maka perangkat daerah yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan sosial ekonomi yang ada di Kecamatan Dendang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Pangan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan masalah, kemudian dilanjutkan dengan dengan memetakan perangkat daerah yang akan merencanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti adalah yang pertama Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM agar mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang bekerja di sektor perkebunan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kedua, Kecamatan Dendang dapat Mengoordinasikan dan mengefektivitaskan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek sosial.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah dalam rangka pengembangan profesi pejabat fungsional agar berdaya saing yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Tim Fasilitator dari Universitas Bangka Belitung (UBB). Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara dan tim fasilitator dalam memberikan bimbingan dalam penyusunan karya ilmiah.

DAFTAR FUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2019. Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik, 2020. Kecamatan Dendang Dalam Angka.

Dinas Kesehatan, 2019. Profil Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.

Firdaus, A. M., Pelupessy, J. M. and Tampubolon, J. R. (2016) 'Strategi Penyelesaian Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kepulauan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah', *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(1), p. 55. doi: 10.15578/jsekp.v11i1.3172.

Halimah, M. and Karyana, A. (2017) 'Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), p. 74. doi: 10.24198/jmpp.v1i1.13544.

M. Bernasconi, C. Choirat, dan R. Seri, "The analytic hierarchy process and the theory of measurement," *Management Science*, vol. 56, no. 4, hal. 699 – 711, 2010.

T. L. Saaty, "Decision making with the analytical hierarchy process," *International Journal Services Sciences*, vol. 1, no. 1, hal. 83 – 98, 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan (<https://www.kemendagri.go.id>)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.